Jurnal Sejarah
Vol 7 (1), 2024
pp. 44-56

Konflik Palestina-Israel: Upaya Penghancuran dan Pertahanan yang belum berakhir, 1917-2017

Made Darme[1], Kurniawati[1]
Farida R. Wargadalem[2]
[1)] Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
[2)] Universitas Sriwijaya, Indonesia

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan negara Palestina dan terbentuknya negara Israel, serta munculnya konflik bangsa Palestina dengan Israel. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari heuristik, kritik (intern dan ekstern), interpretasi, dan historiografi. Kemunculan konflik Palestina-Israel disebabkan wilayah Palestina telah banyak didatangi imigran yang berasal dari bangsa Rumania, Rusia, Polandia, Jerman, dan Amerika. Kedatangan mereka ke Palestina dilakukan secara legal maupun ilegal. Tujuannya untuk membentuk negara baru bernama Israel. Kondisi ini semakin membakar api dari warga Palestina karena Israel telah mendapatkan kemerdekaan pada 15 Mei 1948. Sehingga, Palestina tidak menerima wilayahnya telah diambil oleh bangsa Yahudi. Perang antar kedua negara terus berlanjut sampai saat ini, bahkan Israel tetap mempertahankan wilayah kekuasaan sebagai negara yang merdeka. Untuk menanggapi permasalahan Palestina-Israel telah dilakukan resolusi konflik, hasilnya kedua negara tidak menerima saran dan masukan yang diberikan oleh PBB.

Kata Kunci
Konflik Palestina-Israel,
Deklarasi Balfour,
Gerakan Zionisme,
Masjid Al-Aqsa,
Imigran Yahudi

The Palestine-Israel Conflict: The Unending Attempt of Destruction and Defense, 1917-2017

Abstract
The purpose of this study is to analyze the existence of a Palestinian state and the formation of the state of Israel, as well as the emergence of conflict between the Palestinians and Israel. This research method uses the historical method, which consists of heuristics, criticism (internal and external), interpretation, and historiography. The emergence of the Palestinian-Israeli conflict was because the Palestinian territories had been visited by many immigrants Romanians, Russians, Poles, Germans, and Americans. Their arrival to Palestine is done legally or illegally. The goal is to form a new country called Israel. This condition fueled the flames of the Palestinians because Israel had gained independence on May 15, 1948. Thus, Palestine did not accept that the Jews had taken its territory. The war between the two countries continues to this day, even Israel still maintains its territory as an independent country. To respond to the Palestinian-Israeli problem, a conflict resolution has been carried out, the result of which is that the two countries do not accept the suggestions and input provided by the United Nations.

Keywords
Palestine-Israel conflict,
Balfour Declaration,
Zionism Movement,
Al-Aqsa Mosque,
Jewish immigrants.

Penulis korespondensi:
Made Darme
Universitas Negeri Jakarta
Email: madedarme.me@gmail.com

Pendahuluan

Awal mula berdirinya Palestina setelah Kekaisaran Romawi kembali berkuasa. Pada tahun 63 SM, Pompey menguasai wilayah tanah Israel yakni ketika Yesus lahir. Dalam kepemimpinan di wilayah tersebut diberikan amanat oleh Herodes Agung sebagai raja daerah jajahannya. Namun pada masa pemerintahan Romawi, nama Palestina belum pernah digunakan sama sekali. Istilah Palestina muncul setelah adanya pemberontakan Bar Kochba pada tahun 135 M. Keberhasilan yang dicapai Kaisar Hadrian dalam pemberontakan itu, kemudian merubah nama wilayah Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Selain itu Ia juga merubah nama Israel dan Judea (dua kerajaan di masa Kekaisaran Romawi) menjadi Palestina (Susmiihara, 2011; Yuliani, 2011:17).

Palestina dikenal sebagai kakek moyang yang seluruhnya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim maupun Abraham. Mereka menganggap bahwa Palestina adalah tanah suci bagi para umat beragama Kristen, Yahudi, dan Islam (Rogan, 2009:246). Ketiga umat beragama itu melakukan hubungan baik, namun lama kelamaan karena kekuasaan silih berganti pada akhirnya mereka saling membenci satu sama lain. Hal ini disebabkan hubungan yang tidak harmonis antara bangsa Yahudi dengan Islam. Mereka saling memperebutkan tanah suci sebagai asal-usul lahirnya peradaban bangsa Yahudi atau Islam, sebagaimana kedua pihak saling mempertahankan perjuangan atas kepemilikan tanah tersebut (Islamiyah & Trilaksana, 2016).

Konflik Palestina-Israel bukan hanya terjadi di lingkungan intern namun terus berlanjut ke ranah internasional, sayangnya sampai detik ini masih belum menemukan solusi jalan keluarnya. Berbagai pendapat ahli mengemukakan bahwa muncul konflik Palestina-Israel bukanlah masalah biasa, melainkan suatu bentuk penjajahan dan penjarahan, sehingga konflik ini tidak dapat diselesaikan melalui resolusi konflik. Selain itu, konflik ini muncul juga diawali dari orang-orang Yahudi yang berasal dari segala peradaban dan kebudayaan seluruh dunia. Orang Yahudi beranggapan bahwa mereka merasa paling mulia terhadap kepemilikan tanah yang dijanjikan di Palestina (Syari'ah et al., 2022).

Palestina merupakan tanah yang benar-benar didambakan oleh bangsa Yahudi di Eropa. Keinginan tersebut mendapat "wadah" dengan lahirnya Gerakan Zionis yang berlaku untuk Yahudi di Eropa pada akhir abad XIX M. Alasan ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi berziarah ke Palestina, karena mereka percaya bahwa keberadaan kuburan Raja Daud berlokasi di Palestina (Al-Ghadiry, 2023:63-64). Dari perpindahan orang-orang Yahudi dalam memperebutkan wilayah Palestina bukanlah mengenai agama, namun ada kepentingan politik yang menginginkan tanah Palestina diakui secara hukum berdasarkan *national home* bagi bangsa Yahudi. Upaya ini dilakukan untuk menguasai wilayah teritorial negara secara sah melalui ranah politik (Nurjannah & M. Fakhruddin, 2019).

Kondisi ini tentu pemicu masalah karena banyaknya orang-orang Yahudi masuk ke Palestina kemudian mendirikan sebuah negara bernama Israel. Menurut sejarawan, tanah Kan'an merupakan suatu wilayah yang telah didiami oleh masyarakat Israel. Dengan keberadaan orang-orang Yahudi di kawasan Palestina, kemudian mendirikan sebuah negara bernama Israel. Masalah lain muncul lebih besar karena Palestina-Israel memperebutkan wilayah Baitul Maqdis. Daerah yang sangat penting karena memiliki nilai historis bagi umat Islam. Berhasilnya orang-orang Yahudi mendirikan negara Israel di kawasan yang telah "bertuan tanah" karena tidak lepas dari dorongan gerakan pemikiran Zionisme (Satrianingsih & Abidin, 2016).

Ditinjau dari pemahaman ideologi merujuk pada akar dari permasalahan yang dihadapi Israel adalah salah satu dengan dua realitas peristiwa, yakni pertama Negara Israel yang telah memiliki identitas rela meninggalkan pemahaman ideologi dari Zionisme, baik secara konflik

internal baru yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat Yahudi, Israel, dan lingkungan Bangsa Palestina. Kedua, mendengarkan tuntutan bagi warga Palestina dalam memperjuangkan tuntutan kemerdekaan negaranya. Latar awal permasalahan ini pun telah diklaim disebabkan oleh gerakan Zionisme. Mereka membuat suatu langkah membentuk adanya permusuhan dengan mengobarkan api konflik yang berkepanjangan secara turun-temurun untuk membenci Palestina (A. Y. Firdaus & Yani, 2020). Keadaan ini mengakibatkan dampak yang besar dan luar biasa terhadap seluruh dunia, bahkan seluruh negara bagian Timur Tengah (Arab). Muncul konflik di antara kedua negara tak lain halnya disebabkan adanya pertentangan maupun pertempuran. Pihak kedua negara saling memperjuangkan wilayahnya masing-masing dengan cara peperangan yang tidak pernah berhenti mulai dari awal konflik hingga saat ini (F. Firdaus et al., 2020).

Berbagai permasalahan yang terjadi pada wilayah Palestina telah dikemukakan oleh beberapa peneliti mengenai munculnya konflik di Timur Tengah. Sari (2022) menyatakan suatu konflik yang terjadi antara Palestina-Israel disebabkan adanya kepentingan internal kedua belah pihak, yang meliputi kehendak bangsa Palestina untuk merdeka serta melawan pendudukan dan kehendak Israel untuk mempertahankan pendudukannya di Palestina, tetapi juga terkait dengan pihak eksternal (adanya ikut campur tangan Amerika Serikat terhadap bangsa Israel). Peteet (2005) menyatakan gerakan Zionis sebagai pemberontakan Palestina terhadap perlawanan mandat Inggris pada tahun 1936-1939. Kemudian lanjut berkembang menjadi serangkaian kerusuhan, selain itu terlibat sebagai sekelompok perampok, pembunuh, dan bandit. Hal ini berproses untuk menghalangi pemahaman tentang manifestasi nasionalisme Palestina dan ketidakpuasan mereka terhadap penjajahan. Adhim dan Yuliati (2021) mengemukakan dengan terbentuknya negara Israel yang merdeka, menyulut api konflik bagi warga Palestina terhadap kepemilikan wilayahnya. Keadaan inilah yang mengakibatkan perang terjadi di berbagai wilayah arab sekitarnya.

Bentuk resistensi yang dilakukan oleh Israel bukanlah suatu hal aneh. Kekuatan besar tersebut didukung karena peran dari negara adidaya, yaitu Amerika Serikat. Berbagai tekanan yang diberikan dunia terhadap tindakan Israel mendapat suatu kecaman dari beberapa negara. Israel mempunyai kekuasaan secara leluasa untuk mewujudkan keinginannya, walaupun mendapatkan kecaman-kecaman dari beberapa negara karena kebijakan yang diterapkannya. Resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB, apabila pihak Israel dirugikan maka Amerika akan menjadi penentu untuk memutuskan resolusi tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan bangsa Palestina yang dianggap sebelah mata oleh Amerika. Kondisi ini pun mengalami kebuntuan bagi perjuangan bangsa Palestina. Apalagi mereka dikepung dari para elite-elite global di bawah kendali Amerika Serikat, tak terkecuali Arab merupakan sekutu dari Amerika dengan mudah didikte sesuai arahan yang diperintahkan. Palestina sebagai bagian dari bangsa Arab yang prihatin terhadap sesama umat muslim seolah hanya formalitas saja. Mereka sama sekali tidak memperjuangkan secara sungguh-sungguh dalam kemerdekaan Palestina (Mudore, 2019).

Keterkaitan antara konflik yang terjadi secara internasional dari berbagai belahan dunia telah dikaji oleh peneliti lain. pertama, penelitian oleh Diyarbakirlioğlu (2020) mengemukakan bahwa permasalahan yang terjadi antar Azerbaijan dan Armenia dikarenakan adanya suatu kepentingan untuk menguasai wilayah dengan basis utamanya sumber kekayaan alam, dan perbedaan agama. Kedua, penelitian oleh Abdul dan Mahboob (2016) mengemukakan bahwa sengketa yang terjadi pada negara Pakistan dan India disebabkan adanya pengaruh negara India

yang ingin menguasai Kashmir sebagai bagian dari federasinya. Untuk memperebutkan suatu wilayah demi kepentingan misi utama mereka, yang akhirnya memunculkan sebuah konflik antar kedua negara tersebut. Ketiga, penelitian oleh Justin dan De Vries (2019) mengemukakan bahwa suatu negara apabila telah merdeka, dibagi menjadi dua wilayah akan mengalami konflik di antara mereka. Hal ini berpatokan pada tatanan negara, yang meliputi sistem politik, pembatasan internal, dan hubungan kekuasaan.

Fokus pada kajian artikel ini berbeda dengan ulasan yang disampaikan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana munculnya konflik antar Palestina dan Israel. Secara penelitian diungkapkan berdasarkan perspektif sejarah, namun fokus utamanya membahas kajian permasalahan tentang kehidupan sosial masyarakat Palestina dengan Israel. Sehingga, peneliti tertarik mengulas kajian berjudul "Konflik Palestina-Israel: Upaya Penghancuran dan Pertahanan yang belum berakhir (1917-2017)". Maka, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis keberadaan negara Palestina dan terbentuknya negara Israel, serta munculnya konflik bangsa Palestina dengan Israel.

Metode

Peneliti melakukan kajian dengan menggunakan metode sejarah. Menurut Louis Gottchalk mengemukakan bahwa metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah untuk menemukan data yang autentik dan dapat dipercaya kebenarannya. Tujuan penelitian sejarah adalah melakukan rekonstruksi fenomena masa lalu secara sistematis, objektif, dan akurat (Sudaryono, 2018:88).

Sebagai acuan utama dalam penelitian ini mengikuti empat langkah penelitian, yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Saebani & Sutisna, 2018:247). Heuristik merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan sumber-sumber data yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, dan laporan-laporan yang berkaitan pada penelitian ini. Sumber sekunder pada penelitian ini menggunakan buku berjudul "Sejarah Palestina: Asal-Muasal Konflik Palestina-Israel dan *The Arabs a History*". Sumber utama peneliti menggunakan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian mengenai konflik yang terjadi di Timur Tengah. Setelah sumber terkumpulkan, kemudian peneliti melakukan sebuah kritikan secara intern ataupun ekstern. Dalam kritik intern dilakukan untuk mengetahui setiap kredibilitas sumber-sumber yang ditemukan, baik dari buku maupun jurnal. Sedangkan kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keabsahan maupun keautentikan sumber yang diperoleh, seperti tahun penerbitan penggunaan sumber rujukan penelitian ini.

Langkah selanjutnya interpretasi data yang telah tersedia dengan hasil temuan dapat dipertanggungjawabkan dari keilmiahannya. Peneliti melakukan interpretasi data untuk menghubungkan fakta-fakta mengenai asal-usul permasalahan antara Palestina dengan Israel. Langkah terakhir, peneliti melakukan penyusunan laporan hasil data yang telah dirangkum atau diistilahkan historiografi. Sebagaimana melakukan penyusunan kerangka berpikir berdasarkan langkah-langkah penulisan sejarah secara kronologis, mulai pernyataan Deklarasi Balfour oleh pemerintah Inggris hingga terpecahnya negara Palestina menjadi dua bagian negara (Irwanto & Sair, 2014, hlm. 57-160).

Sejarah Berdirinya Negara Palestina dan Israel

Palestina adalah suatu keberadaan bangsa Philistin atau Pulasati yang mendiaminya sejak abad XII SM. Berbagai pakar sejarawan menyebutkan bahwa bangsa Philistin berasal dari Laut Aegia (Laut Anata), yakni Asia kecil dan Yunani. Mereka hidup dengan melihat apakah keberadaannya telah terpenuhi, mulai dari tempat tinggal, sandang papan dan pangan, serta keamanan dari serangan lawan. Dengan mengetahui daratan Philistin yang sangat bagus untuk di tempat tinggali, maka mereka menguasai wilayahnya berbatasan dengan Sinai di selatan, sepanjang pesisir Syiria di Utara. Pertama kali muncul nama Palestina disebutkan oleh Bapak Sejarawan bernama Horodotus dari Yunani (Cahya, 2022; Wirajaya, 2020).

Penduduk Palestina berasal dari keturunan dari dua bangsa, yaitu Philistin dan Kan'an. Diketahui keberadaan kedua orang itu telah mendiami wilayah Palestina selama kurang lebih 40 abad. Namun keturunan orang-orang Palestina bukan hanya dua bangsa saja melainkan mereka telah tercampur dengan beberapa keturunan dari bangsa lain, seperti Romawi, Yunani, Arab, Mongolia, dan Turki. Mengenai penganut agama mayoritas mereka adalah agama Islam, sedangkan sisanya agama Kristen. Setelah kekuasaan tidak lagi dipimpin oleh umat Muslim, hal ini berdampak banyaknya para imigran Yahudi mulai berdatangan ke Palestina. Sebagaimana mereka akan bertempat tinggal dan menetap di daerah tersebut. Alasan ini berasal dari amanat yang telah disampaikan oleh Theodore Herzl. Ia adalah pemimpin Gerakan Zionisme atau dikenal seseorang yang telah mendeklarasikan kemerdekaan Israel, selain itu juga menandainya sebagai pendiri modern yang sah Zionisme. Keadaan inilah yang menyebabkan berbagai imigran Yahudi berdatangan ke Palestina, mulai dari negara Jerman, Rusia, Bulgaria, Yugoslavoa, Aden, serta negara di Afrika (Mullins, 2016; Nurjannah & M. Fakhruddin, 2019).

Proses penyebaran Islam di Palestina juga tidak terlepas dari penguasa Arab Muslim pada tahun 638 M. Kemudian dilanjutkan kembali pada masa kekuasaan Turki Usmani (Ottoman) yang berkuasa selama 400 tahun (1517-1917). Sejak kekuasaan beralih di tangan kepemimpinan orang muslim, banyak penduduk umat Islam pindah ke Palestina atau terjadinya Islamisasi. Hal ini tidak lepas dari adanya kota suci yang dikenal sebagai Kota Yerusalem, sebagaimana identik terhadap kehidupan bagi para umat beragama Islam. Mereka menganggap bahwa salah satu bangunan suci umat Islam adalah Masjidil Aqsa (Baitul Maqdis). Salah satu masjid yang disucikan dari tiga masjid penting di Arab, selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah (Hasyim, 2019). Keberadaan Masjid Aqsa adalah suatu kebesaran Nabi Muhammad SAW dalam memperlihatkan mukjizat Mi'raj-nya. Tentunya bangsa Arab yang tinggal selama berabad-abad lamanya di Palestina, sebagaimana telah menunjukkan perkembangan penduduk umat beragama Islam menjadi mayoritas dibandingkan agama lainnya. Keadaan ini wajar karena lahirnya mereka dari wilayah Palestina sebagai negeri dan tanah airnya (Indrawan, 2018).

Sejak berdirinya negara Israel, imigran Yahudi semakin bertambah masuk ke Palestina. Apalagi mereka datang dari berbagai negara yang beda asal-usulnya. Dengan melimpahnya imigran Yahudi yang berada di Palestina, kemudian mereka menyusun suatu konsep untuk menguasai seluruh wilayah Palestina. Hal ini dikarenakan mereka meyakini dari kitab suci (Kristen) menyatakan bahwa Palestina merupakan suatu tempat yang telah dijanjikan untuk umat Kristiani. Alasan ini menjadi dasar yang semakin kuat bagi orang-orang Yahudi dalam menempati wilayah Palestina. Saat ini penduduk Yahudi semakin meningkat jumlahnya dan hampir merata wilayah Palestina berada digenggamkannya. Selain itu mereka enggan untuk melepaskannya.

Tentunya dengan terbentuknya negara Israel yang sah sebagai negara berdaulat. Disisi lain warga Palestina berdiaspora untuk meninggalkan daerah yang telah dikuasai tersebut. Mereka berpindah ke negara-negara tetangga. Kondisi ini pun terus dimanfaatkan oleh Israel dalam memperluas kekuasaannya. Untuk mewujudkan ambisi tersebut berbagai hal terus dilakukan seperti penindasan warga Palestina hingga pengambilan tanah secara paksa.

Keberadaan Kekuasaan Inggris di Palestina

Pada tahun 1916, seseorang yang diwakilkan dari Kerajaan Inggris dan Perancis adalah Sir Mark Sykes dan Francois Georges Picot. Mereka ditugaskan untuk menangani masa depan Timur Tengah. Istilah umum kedua orang tersebut dikenal sebagai perjanjian Skyes – Picot yang berarti dasar dari pembuatan peta politik Timur Tengah terbagi menjadi beberapa wilayah yang dinyatakan sebagai negara merdeka. Berdasarkan perjanjian itu berbagai kebijakan diciptakan oleh pemerintah Inggris dan Perancis untuk memperoleh keuntungan secara sepihak. Hal ini terbukti dari terciptanya sistem struktur politik yang dibuat, bahkan struktur yang dibuat tersebut mendapatkan kecaman dari Negara Muslim (ISIS). ISIS menyebutkan bahwa Perjanjian Sykes – Pico ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni tidak ada pemberlakuan antara batas-batas yang telah ditentukan kedua negara tersebut, menghapus segala tindakan yang dapat memisahkan unit negara-negara Arab, dan mengembalikan Timur Tengah seperti semula tanpa adanya pemecah belah masyarakat muslim di Timur Tengah. Walaupun akar dari permasalahan ini muncul karena kekalahan Kekaisaran Ottoman jatuh ke tangan Inggris pada Perang Dunia I sebagai awal berlangsungnya konflik yang terjadi di Timur Tengah (Biger, 2016).

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, dimana Inggris sebagai bagian dari pihak Sekutu, maka Inggris beserta Liga Bangsa-Bangsa (LBB) membentuk sebuah mandat tentang wilayah yang hendak dikuasai dari masa kemenangan pihak Sentral. Sistem mandat yang diterapkan untuk menguasai wilayah pihak Sentral adalah bentuk alih perpindahan tangan kekuasaan sementara waktu bagi Sekutu (Inggris) karena memenangkan perang dan wilayah Palestina akhirnya masuk dalam genggaman Inggris. Setelah Palestina menjadi bagian dari koloni Inggris, sehingga menerapkan suatu kebijakan mengenai menjanjikan tanah secara legal maupun ilegal bagi orang-orang Yahudi ke Palestina. Sebagaimana wilayah Palestina akan dijadikan sebagai negara bernama Israel. Walaupun kekuasaan diambil alih oleh Inggris, namun warga Palestina tetap menentukan nasib sendiri dalam mendirikan negara. Akan tetapi, Inggris menolak dengan alasan telah melaksanakan pernyataan dari Deklarasi Balfour.

Pada tanggal 2 November 1917, Arthur James Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, menyampaikan janji berikut dalam surat publiknya kepada seorang Zionis Inggris terkemuka, Lord Walter Rothschild. Surat tersebut berbunyi, sebagai berikut:

"*Pemerintah Yang Mulia berpandangan mendukung pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, dan akan melakukan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi hal tersebut. Lord Arthur Balfour dari Inggris di Yerusalem pada tahun 1925. Topikal pencapaian objek ini, itu menjadi Agen Pers/Arsip Hulton/Getty Images. dipahami dengan jelas bahwa tidak boleh ada tindakan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak-hak dan status politik yang dinikmati oleh orang-orang Yahudi di negara lain mana pun*".

Arti pesan tersebut menjelaskan pemerintah Inggris mendukung sepenuhnya dalam pendirian tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, sebagaimana untuk mempermudahkan segala urusan tujuan yang dicapai tanpa ada yang menghalangi, baik dari sipil maupun komunitas non-Yahudi di Palestina" (Adhim & Yuliati, 2021; Bus, 2017).

Baik Palestina ataupun Israel telah diberi janji oleh pemerintahan Inggris untuk membentuk suatu pemerintahan yang berdiri sendiri. Namun kedua negara berbeda pendapat yang akhirnya menimbulkan perselisihan tentang siapa yang berhak untuk menempati wilayah Palestina. Keadaan ini pun terus berlanjut sampai 30 tahun lamanya kekuasaan Inggris menguasai teritori Palestina. Dampaknya kedua negara saling bentrok dan menimbulkan perang tak henti-henti. Masuk pada masa Perang Dunia II di Eropa, pembantaian yang terjadi dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Rezim Nazi terlibat dalam upaya intensif untuk menarik orang Arab dan Muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara. Hal itu dilakukan dengan menampilkan rezim Nazi sebagai juara anti-imperialisme sekuler, terutama melawan Inggris, serta dengan pengambilan dan penerimaan selektif terhadap tradisi Islam dengan cara yang menunjukkan kesesuaiannya dengan ideologi Sosialisme Nasional (Herf, 2009).

Keadaan ini semakin menyulut api berkobar bagi Bangsa Yahudi untuk tetap kembali menguasai wilayah Palestina. Kolonisasi Palestina yang telah dikuasai oleh Inggris sebagai mandat yang ditunjuk LBB, namun penugasan Inggris tidak mampu menyelesaikan permasalahan atas wilayah Palestina dengan Israel. Ketidakmampuan Inggris dalam mengurus Palestina yang tidak begitu bagus, pada akhirnya dijadikan kesempatan bagi orang-orang Yahudi untuk memproklamasikan berdirinya Negara Israel tahun 1948. Begitu pula dukungan terhadap Israel disokong oleh negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Karena didukung oleh negara besar, hal ini membuat Israel semakin menjadi untuk bertindak semena-mena melakukan peperangan terhadap negara-negara lain, seperti Suriah, Lebanon, Mesir, Yordania, dan Irak. Tujuan dari peperangan ini untuk memperebutkan Tepi Barat dan Jalur Gaja. Kemenangan ini pun diperoleh Israel dengan mengalahkan Jordania, Suriah, dan Mesir selama enam hari berperang, yakni pada 5-11 Juni 1967. Karena kemenangan berada dipihak Israel, maka berhak menduduki wilayah Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Namun pada tahun 1982, wilayah Sinai tidak lagi dikuasai oleh Israel dan dikembalikan sepenuhnya kepada Mesir. Dari kemenangan Israel terhadap negara-negara Arab, secara total luas wilayah mencapai lebih dari 70 persen, tentunya hal ini telah melebihi mandat yang telah ditentukan oleh PBB (Indrawan, 2018).

Luas kekuasaan tanah yang dimiliki oleh Israel namun tidak memadamkan api semangat Palestina untuk memperjuangkan dalam meraih kemerdekaan. Harapan untuk mencapai kemerdekaan pun tidak sia-sia, karena Palestina telah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1988, walaupun kemerdekaannya belum diakui dari beberapa negara lain, sampai saat ini Palestina tetap memperjuangkan kemerdekaannya di kancah forum internasional sebagai salah satu hak negara untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan kolonial (Nurjannah & M. Fakhruddin, 2019).

Masuknya Imigran Yahudi di Palestina

Pemukiman Yahudi di Palestina merupakan inti infiltrasi ke negara tersebut, selain itu melakukan suatu penjualan tanah dari kepemilikan orang Palestine kemudian dibeli oleh pihak asing (Yahudi). Bukan hanya itu, keberadaan warga non-Palestina melakukan perpindahan ke wilayah kelompok Yahudi (Israel). Saat ini jumlah pemukiman yang dibangun oleh Yahudi berkisar 24 ribu sampai 50 ribu jiwa, sejak berakhirnya kekuasaan Usmaniyah tahun 1882 sampai 1903 di Palestina (Rogan, 2009:246). Proses imigrasi Yahudi ke tanah Palestina terfasilitasi, dan jumlah mereka meningkat. Hal ini dikarenakan pemeliharaan aliran emigrasi

sejak 1850, yaitu diakhir periode Usmaniyah. Berikut dijelaskan mengenai imigrasi Yahudi di Palestina berdasarkan tabel 1, di bawah ini:

Tabel 1. Imigrasi orang-orang Yahudi di Palestina

Periode	Total Imigrasi Yahudi dalam ribuan	Rata-rata tahunan dari imigrasi Yahudi dalam ribuan
1850-1880	25	0,8
1881-1903	25	1
1904-1910	20	2,9
1911-1914	14	3,5
Total	**84**	**1,4**

Sumber: Al-Ghadiry (2023:91).

Lanjut tambahan dari Pusat Informasi Nasional Palestina masuknya orang-orang Yahudi ke Palestina pada akhir abad XIX M sampai Perang Dunia II. Berdasarkan proses masuknya Yahudi ke Palestina mengikuti proses imigrasi ke dalam lima tahap. *Pertama,* imigrasi tahun 1882-1903 menjelaskan imigrasi terbagi menjadi dua kelompok, sekitar 25 ribu orang Yahudi datang ke Palestina. Sebagian besar dari mereka berasal dari Rumania dan Rusia. *Kedua*, imigrasi tahun 1904-1918 menjelaskan pembentukan gerakan Zionisme, jumlah imigran mencapai sekitar 40 ribu jiwa. Sebagian besar mereka berasal dari Rumania dan Rusia. *Ketiga*, imigrasi tahun 1919-1923 menjelaskan kedatangan imigran mencapai 35 ribu orang-orang Yahudi, dengan rata-rata delapan ribu imigran pertahun. Sebagian mereka berasal dari Rusia, Rumania, Polandia, Jerman, dan Amerika. *Keempat,* imigrasi tahun 1924-1932 menjelaskan pada saat Inggris menguasai wilayah Palestina, masa inilah imigran mencapai 80 ribu masuk ke Palestina. Sebagian besar mereka berasal dari kelas menengah khusus negara Polandia. Kelima, imigrasi tahun 1933-1939 menjelaskan jumlah imigran yang datang ke Palestina mencapai 215 ribu, sebagian besar orang-orang yang berpindah berasal dari Eropa-Tengah.

Mengenai asal usul bangsa Yahudi berasal dari keturunan Nabi Ibrahim yang lahir di Palestina. Hal ini berlatar belakang para imigran yang pindah di Palestina kebanyakan berasal dari Eropa Timur. Tentunya permasalahan ini tidak terlepas dari perselisihan antara bangsa Slavia dengan Yahudi. Berbagai tindakan penindasan yang dilakukan Slavia terhadap orang-orang Yahudi mengakibatkan melarikan diri ke luar negeri dan sebagian hidup di bawah pemerintahan Rusia. Selain itu permasalahan ekonomi menjadi bagian penting bagi kehidupan orang-orang Eropa Timur, apalagi dibandingkan dengan Eropa Barat. Kehidupan orang-orang Eropa Barat lebih baik dan kesejahteraan hidup terjamin. Keadaan inilah yang menjadi alasan besar bagi orang Eropa Timur (Yahudi) melakukan imigrasi ke Palestina agar kehidupannya lebih baik dari tempat tinggal sebelumnya. Sebagaimana diketahui Palestina memiliki letak strategis dan kekayaan emas hitam yang melimpah. Namun perpindahannya menjadi masalah besar karena bangsa Yahudi mendirikan sebuah negara di wilayah Palestina (Hasyim, 2019).

Pada tahun 1947, mandat Inggris atas Palestina berakhir dan PBB mengambil alih kekuasaan. Berdasarkan dikeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 181 tertanggal 29 November 1947. Isi dari surat tersebut menjelaskan bahwa pemisahan wilayah Palestina menjadi dua bagian negara, yaitu bangsa Yahudi dan Arab. Pembagian wilayah lebih banyak untuk Yahudi, sebanyak 55 persen. Sisanya diberikan untuk bangsa Arab. Alasan PBB

memberikan wilayah lebih kepada bangsa Yahudi dikarenakan mayoritas penduduknya melebihi dari bangsa Arab. Upaya negara-negara besar seperti Prancis, Amerika Serikat, Spanyol, Lebanon, dan Uni Soviet untuk membantu dalam menyelesaikan masalah Israel-Palestina. Bukannya mendapat suatu ucapan terima kasih dari kedua belah pihak, tetapi mendapat suatu protes keras dari penduduk Palestina. Mereka menggalang adanya demonstrasi secara besar-besaran untuk menentang terhadap kebijakan yang telah ditetapkan PBB. Berbeda dengan keadaan penduduk Israel yang merasa tenang karena kemenangan berada pada pihak mereka. Namun dilain pihak, Palestina juga mendapat bantuan persenjataan perang dari beberapa negara Arab (Aswir F Badjodah et al., 2021; I Gede Sumertha KY et al., 2017).

Keberhasilan sekelompok bangsa Yahudi untuk mendirikan negara Israel telah tercapai pada 14 Mei 1948. Dengan memproklamasikan kemerdekaan tersebut menandakan bahwa cita-cita bangsa Yahudi telah terwujud, sebagaimana mereka berhasil melaksanakan amanat dari Theodore Herzl bertuliskan *Der Judenstaat* (Negara Yahudi) sejak 1896. Di Timur Tengah bukan hanya sebagai kelompok manusia yang penganut mayoritas beragama Islam, namun juga terdapat sekelompok umat manusia yang berkebudayaan dan bergaya kebarat-baratan. Alasan bangsa Yahudi memilih Palestina sebagai tempat bermukim dikarenakan memiliki latar belakang sejarah akibat dari pembantaian kelompok Nazi, sehingga mereka mencari daerah yang aman dan berpegang teguh pada Taurat. Hal yang paling penting wilayah Palestina memiliki titik pusat vital dalam kekuatan dunia dan lokasi strategis kemiliteran sebagai tonggak menguasai dunia. Inggris ditawarkan untuk memilih kawasan Argentina, Urganda, dan Palestina, akan tetapi Herzl dengan keputusannya memilih Palestina (F. Firdaus et al., 2020). Alasan Inggris tidak memilih Argentina dan Urganda adalah wilayah yang akan ditempati kurang memiliki arti penting bagi orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa Palestina menjadi fondasi dalam membangun kekuatan besar di dunia, baik secara politik, ekonomi, dan keamanan.

Sebagian ahli mengatakan bahwa sesuatu pembentukan sebuah negara untuk orang-orang Yahudi dengan mengidealkan tanah Palestina sebagai dalih mempunyai keterkaitan sejarah masa lalu. Hal ini dikenal dengan nama *historic right or historic title*, namun pernyataan tersebut tidak memiliki asas yang nyata dalam perundang-undangan dan dasar hukum. Cattan (dalam Muchsin, 2015) mengatakan bahwa sesuai pemberlakuan undang-undang antarbangsa yang ditetapkan serta sejarah lama dikaitkan tidaklah menjadi benar. Kedua istilah tersebut digunakan untuk mendapatkan hak wilayah (*territory*) yang berada di daerah perairan (*maritime*) pada satu negara. Dengan demikian, perpindahan orang-orang Yahudi ke Palestina merupakan suatu keberlanjutan aliran imigrasi, tanpa interupsi, dan imigrasi tersebut diorganisir dengan sangat baik dan memiliki tujuan khusus. Artinya, imigrasi yang dilaksanakan pada wilayah Palestina untuk orang-orang Yahudi sebagai upaya pembentukan sebuah negara baru, bernama Israel.

Munculnya Konflik Bangsa Palestina-Israel

Konflik Palestina-Israel adalah suatu permasalahan yang muncul dari berbagai literatur dinyatakan sebagai gambaran adanya konflik pelik. Menurut Kriesbers menyatakan bahwa adanya tiga penekanan yang mengartikan konflik pelik: Pertama, konflik yang terjadi secara berlarut dan bertahan dalam rentang waktu yang amat lama. Semenjak dikeluarkan Deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang menyatakan perpindahan orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia untuk dapat menempati wilayah Palestina. Kondisi ini kemudian menimbulkan suatu permasalahan yang tak tertuntaskan, baik secara konflik masing-masing pihak Hamas dengan Fatah di Palestina, kelompok aliran paham kanan-kiri dari Israel, munculnya konflik bagi

penduduk Palestina dengan otoritas Israel, serta keterkaitan antara pihak-pihak lain mengenai konflik kedua negara tersebut. Kekuasaan Palestina secara penuh telah dikuasai oleh *Palestine Liberation Organization* (PLO), salah satu partai politik yang bergabung adalah Fatah. Hal ini menyebabkan terjadinya perlawanan antar kelompok Hamas, sehingga Jalur Gaza dan Tepi Barat akhirnya dikuasai oleh aliran yang berbeda dari dua kelompok Palestina, yakni Jalur Gaza bagian kekuasaan Hamas dan Tepi Barat bagian kekuasaan Fatah.

Kedua, konflik dari adanya kelompok lawan memiliki karakteristik untuk menghancurkan. Faktanya konflik Palestina-Israel terlihat saling berusaha untuk menjatuhkan dari pihak satu sama lainnya. Dengan kondisi polemik konflik yang terjadi di Palestina, mengakibatkan adanya suatu tuduhan besar dari perlakuan yang dibuat oleh Israel. Mereka beranggapan bahwa Israel telah membuat peraturan yang dapat menyengsarakan warga Palestina. Keadaan ini semakin membuat kecurigaan dan ketegangan antar kedua negara yang berdampak pada kehidupan mereka yang terjadi di esok hari. Aksi anarkis yang terjadi antar kelompok Hamas menyerang penduduk Palestina. Masing-masing dari kedua negara melakukan pelemparan batu maupun penyerangan terhadap masyarakat sipil maupun aparat kemiliteran, namun dampak penderitaan besar dialami oleh warga Palestina.

Ketiga, berbagai nasabah yang menjadi partisipan atau perantara dalam mengakhiri permasalahan antar Palestina dengan Israel selalu mengalami kegagalan. Bentuk upaya yang dicoba membawa Palestina-Israel pada meja perundingan, namun hasil keputusan yang diperoleh belum mendapatkan jalan keluar dalam menangani konflik tersebut. Inisiatif datang dari berbagai belahan dunia seperti membuat suatu agenda khusus dalam persidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka akan membentuk konferensi antar negara-negara untuk mendiskusikan konflik tersebut. Gagasan yang terbaru muncul datang dari Prancis sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi perdamaian di Paris, tertanggal 15 Januari 2017. Berbagai negara yang hadir dalam pertemuan tersebut sebanyak 70 negara, selain itu juga dihadiri organisasi internasional dan organisasi kawasan lainnya. Permasalahan yang muncul terjadi kedua negara tidak menghadiri perundingan tersebut. Hasil dari perundingan Perancis menghasilkan "Israel dilarang membangun pemukiman bangunan di wilayah Palestina". Muncul sebuah penolakan dari Israel terhadap hasil perundingan tersebut, sehingga Konferensi Perdamaian di Perancis dinyatakan gagal. Selanjutnya terdapat negara-negara besar ikut andil dalam menangani konflik Palestina-Israel, seperti Amerika Serikat, Spanyol, Lebanon, dan Uni Soviet. Namun kondisi ini masih belum menemui suatu perdamaian diantara kedua negara tersebut (I Gede Sumertha KY et al., 2017).

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah Perang Dunia I dimenang oleh pihak Sekutu, maka peralihan wilayah berhak dimiliki bagi para pemenang, khusus di Timur Tengah yang dikuasai oleh Jerman berhak diambil alih oleh pihak sekutu. Inggris merupakan bagian dari anggota sekutu mengambil alih wilayah kekuasaan Turki Usmani, yaitu Palestina. Maka, wilayah Palestina secara resmi di bawah koloni Inggris. Berbagai kebijakan Inggris terhadap wilayah Palestina untuk mewujudkan berdirinya negara baru. Untuk memperlancar keinginan tersebut, ia mengizinkan setiap orang berhak memasuki Palestina sebagai tempat tinggalnya. Orang-orang inilah yang disebut sebagai Yahudi. Secara umum mereka berasal dari belahan negara, yang meliputi Rumania, Rusia, Polandia, Jerman, dan Amerika. Proses perpindahan mereka ke tanah Palestina dilakukan secara legal maupun ilegal.

Keadaan ini disetujui karena penyampaian Deklarasi Balfaour, yang menyampaikan bahwa tidak ada suatu pelarangan orang-orang Yahudi melakukan migrasi ke tanah Palestina, sebagaimana untuk memperoleh penduduk yang lebih banyak dari warga Palestina. Tujuannya adalah untuk mendirikan sebuah negara baru bernama Israel.

Setelah terbentuk negara Israel pada 15 Mei 1948, hal ini semakin menyolot api timbulnya konflik semakin membesar antara Palestina dengan Israel. Wilayah Israel yang semakin meluas, sebaliknya wilayah Palestina semakin memperkecil. Tentunya karena berbagai faktor dari keadaan ekonomi yang semakin sulit, pada akhirnya mereka akan memperjual tanahnya kepada warga Israel. Konflik yang tidak dapat diselesaikan antar kedua negara, karena saling ingin mempertahankan kekuasaan wilayah masing-masing, walaupun telah ada resolusi konflik untuk kedamaian kedua negara tersebut. Dukungan yang diberikan oleh negara adidaya terhadap Israel maka akan memberikan suatu keamanan bagi negaranya, walaupun dari pihak PBB telah memberikan ancaman keras terhadap tindakan Israel bagi warga Israel. Konflik antar Palestina-Israel yang terus berlanjut hingga saat ini, tentunya menjadi bagian polemik terhadap perdamaian dunia internasional.

Referensi

Abdul, M., & Mahboob, H. (2016). Kashmir: A Conflict between India and Pakistan. *South Asian Studies*, *31*(1), 149. https://www.prdb.pk/article/kashmir-a-conflict-between-india-and-pakistan-4733

Adhim, S., & Yuliati, Y. (2021). Konflik Terbentuknya Negara Israel pada Tahun 1948-1973. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, *2*(1), 61–70. https://doi.org/10.21154/asanka.v2i1.2429

Al-Ghadiry, F. (2023). *Sejarah Palestina: Asal-Muasal Konflik Palestina-Israel*. Book Marks.

Aswir F Badjodah, Mahmud Husen, & Saiful Ahmad. (2021). Dinamika Konflik dan Upaya Konsensus Palestina-Israel (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement) Tahun 1993). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, *1*(3), 409–420. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.619

Biger, G. (2016). Is the Sykes – Picot agreement of 1916 was the basis for the political division of the Middle East. *Journal of Geography, Politics and Society*, *6*(3), 50–58. https://doi.org/10.4467/24512249JG.16.019.5806

Bus, Y. (2017). Deklarasi Balfour, lahirnya sebuah prasangka 100 tahun : Mengenang Satu abad Deklarasi Balfour 1917-2017. *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, *3798*(14), 15–40. https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.70

Cahya, E. N. (2022). Agresi Israel Terhadap Palestina Yang Berujung Pelanggaran Ham Pada Palestina. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, *3*(1), 43. https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i1.52144

Diyarbakirlioğlu, K. (2020). The Nagorno-Karabakh Conflict between Azerbaijan and Armenia from the Historical Perspective. *International Journal of Social, Political and Economic Research*, *7*(2), 415–439. https://doi.org/10.46291/ijospervol7iss2pp415-439

Firdaus, A. Y., & Yani, Y. M. (2020). Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel. *POPULIS: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(1), 104–110. https://doi.org/dx.doi.org/10.47313/pjsh.v5i1.824

Firdaus, F., Septian Putra, J., Saaulia, R., & Adnis, S. (2020). Yasser Arafat dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah). *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, *10*(1), 1–12.

https://doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.265
Hasyim, M. S. (2019). Perkembangan Zionisme dan Berdirinya Negara Israel. *Jurnal Al-Asas*, *II*(1), 47. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/931
Herf, J. (2009). Nazi Germany's propaganda aimed at Arabs and Muslims during World War II and the Holocaust: Old themes, new archival findings. *Central European History*, *42*(4), 709–736. https://doi.org/10.1017/S000893890999104X
I Gede Sumertha KY, Ismadi, A., & Wibowo, H. A. (2017). Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina The Involvement of the Indonesian Government in The Peace Process of Israeli-Palestinian Conflict. *Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan*, *3*(1), 1–28. https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/68
Indrawan, R. M. J. (2018). Pemahaman Kompetensi Lintas Budaya Bagi UNTSO (United Nation Truce Supervision Organization) Untuk Memecah Kebuntuan Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel. *UPH Journal of International Relations*, *9*(18), 14–27. https://doi.org/10.19166/verity.v9i18.771
Irwanto, D., & Sair, A. (2014). *Metodologi dan Historiografi Sejarah: Cara Cepat Menulis Sejarah*. Eja Publisher.
Islamiyah, N., & Trilaksana, A. (2016). Aspek Historis Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1995. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, *4*(3), 902–916. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/16146
Justin, P. H., & De Vries, L. (2019). Governing Unclear Lines: Local Boundaries as a (Re)source of Conflict in South Sudan. *Journal of Borderlands Studies*, *34*(1), 31–46. https://doi.org/10.1080/08865655.2017.1294497
Muchsin, M. A. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *39*(2), 390–406. https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.32
Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. *Jurnal CMES*, *12*(2), 170. https://doi.org/10.20961/cmes.12.2.37891
Mullins, G. (2016). Israel and Palestine: Three Million People Displaced. In *The Ciceronian* (Vol. 1, pp. 29–32). The Morehead State University Cicero Society.
Nurjannah, E. P., & M. Fakhruddin. (2019). Deklarasi Balfour : Awal Mula Konflik Israel Palestina. *PERIODE: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, *1*(1), 15–26. https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10479
Peteet, J. (2005). Words as interventions: Naming in the Palestine - Israel conflict. *Third World Quarterly*, *26*(1), 153–172. https://doi.org/10.1080/0143659042000322964
Rogan, E. (2009). *The Arabs a History* (edition 1). Penguin Books.
Saebani, B. A., & Sutisna, H. Y. (2018). *Metode Penelitian (Edisi Revisi)* (Cet-1). CV Pustaka Setia.
Sari, A. T. P. (2022). Konflik Palestina-Israel Pada Masa Intifada II dalam Perspektif Konstruktivisme dan Strategi Politik. *Jurnal ICMES*, *6*(1), 21–34. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i1.120
Satrianingsih, A., & Abidin, Z. (2016). Sejarah Zionisme dan Berdirinya Negara Israel. *Jurnal Adabiyah*, *16*(2), 172–184. https://doi.org/10.24252/jad.v17i116i2a7
Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian* (Cet-2). Rajawali Pres.
Susmihara. (2011). Konflik Arab-Israel di Palestina. *Jurnal Adabiyah*, *11*(1), 44–52. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/2367

Syari'ah, A., Nabilah, N., & Wijayanti, R. (2022). Kekejaman Israel Terhadap Rakyat Palestina: Telaah Berita-Berita CNN Indonesia Tahun 2019-2021. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, *1*(1), 58–80. https://doi.org/10.18860/dsjpips.v1i1.1039

Wirajaya, A. C. (2020). Penyelesaian Sengketa Palestina Dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina Di Israel). *Lex Et Societatis*, *8*(4), 45–52. https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30909

Yuliani, R. (2011). *Konflik Arab Israel: Pengusiran Etnis Palestina dan Diaspora Etnis Palestina*. Universitas Islam Negeri.